

Motivasi Mahasiswa sebagai Komunikator Politik dalam Pilkada di Provinsi Sultra

Motivations of University Students as Political Communicators in Regional Head Elections in Southeast Sulawesi Province

Irmawanti¹, Nazaruddin²

^{1,2}Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Halu Oleo

Alamat: Jalan H.E.A. Mokodompit, Kodya Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email korespondensi: irmawanti.kf@uho.ac.id

Diterima: 08 Maret 2026 || Revisi: 17 Juni 2026 || Disetujui: 18 Juni 2026

Abstract

The 2024 simultaneous regional elections in Southeast Sulawesi served as an important arena for demonstrating the significant role of the younger generation in local political dynamics. Behind this high level of youth participation, a number of students have emerged not only as voters but also as political communicators. They express ideas, disseminate information, and shape public opinion in both offline and online spaces. This study aims to gain a deeper understanding of the motivations that encourage students to participate in the 2024 Southeast Sulawesi gubernatorial election. Using a descriptive qualitative approach and grounded in Self-Determination Theory (SDT), this research examines students' motivations through three key dimensions: autonomy, competence, and relatedness. Dan Nimmo's political communication theory is also employed to understand their positions within the political communication process, whether as activists, professionals, or potential future politicians. In-depth interviews were conducted with Communication Science students who actively engage as political communicators. The findings reveal that their motivations are driven not only by idealism or a sense of social responsibility but also by opportunities for self-actualization and professional development. These students perform their communicative roles with reflection and conscious awareness, making political communication not merely a technical activity but also a meaningful form of civic participation. The study demonstrates that students are no longer passive objects within the political process but rather active actors who possess voices, strategies, and strong enthusiasm for shaping the future direction of their region.

Keywords: *political communicators, motivation, Self-Determination Theory, political communication, regional elections*

Abstrak

Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Tenggara menjadi panggung yang memperlihatkan besarnya peran generasi muda dalam dinamika politik lokal. Di balik tingginya partisipasi pemuda tersebut, terdapat kelompok mahasiswa yang tampil bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai komunikator politik. Mereka menyuarakan gagasan, menyebarkan informasi, dan membentuk opini publik, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Penelitian ini mencoba memahami lebih dalam motivasi mereka terlibat dalam proses Pilkada Provinsi Sultra tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berlandaskan teori *Self-Determination Theory* (SDT), penelitian ini menyoroti motivasi mahasiswa melalui tiga dimensi utama, yakni otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Teori komunikasi politik dari Dan Nimmo juga digunakan untuk memahami posisi mereka, apakah sebagai aktivis, profesional, atau bahkan calon politikus. Wawancara mendalam dilakukan terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi yang aktif sebagai komunikator politik. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa motivasi muncul bukan hanya karena idealisme atau rasa tanggung jawab sosial, tetapi juga karena adanya ruang untuk aktualisasi diri, bahkan peluang untuk berkembang secara profesional. Mereka menjalankan peran komunikatif ini dengan reflektif dan sadar posisi, menjadikan komunikasi politik bukan sekadar kerja teknis, tetapi juga wujud partisipasi yang bermakna. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa bukan lagi sekadar objek dalam proses politik, tetapi aktor yang punya suara, strategi, dan semangat untuk ikut menentukan arah masa depan daerahnya.

Kata kunci: Komunikator Politik, Motivasi, *Self-Determination Theory*, Komunikasi Politik, Pilkada

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menorehkan catatan penting dalam Pilkada 2024 dengan capaian yang membanggakan yakni menjadi daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Indonesia. Pada Pemilihan Gubernur atau biasa disebut dengan Pilgub, partisipasi mencapai 81,36 persen, sementara Pemilihan Bupati/Wali Kota (Pilbup/Pilwakot) berada di angka 81,28 persen. Dari total 1.876.792 pemilih, sebagian besar berasal dari kalangan muda. Generasi milenial tercatat sebagai kelompok pemilih terbanyak dengan 653.297 orang atau sekitar 34,82 persen, disusul oleh generasi Z sebanyak 548.102 orang atau 29,20 persen dari total pemilih (Indriyani, 2024).



Gambar 1. Jumlah Pemilih pada Pilkada Provinsi Sultra Tahun 2024

Sumber: Instagram @kpuprovsultra, 2024

Tingginya angka partisipasi ini tentu bukan tanpa sebab. Pilkada serentak yang digelar di semua tingkatan untuk pertama kalinya membawa nuansa baru dalam perpolitikan lokal. Suasana penuh semangat dan antusiasme terasa di berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya karena gencarnya kampanye dari para kandidat, tetapi juga karena derasnya aliran informasi yang

menyentuh hampir setiap ruang kehidupan, baik melalui media konvensional maupun digital. Menariknya, arus informasi tidak melulu berasal dari penyelenggara atau kontestan. Pemilih muda, termasuk mahasiswa, ikut andil besar dalam menyebarkan pesan-pesan politik (Yunus, 2024).

Menurut Ananda (2014) mahasiswa memiliki empat peran, pertama sebagai generasi perubahan (*Agent of Change*). Kedua, generasi pengontrol (*Social Control*), ketiga generasi penerus (*iron stock*). Keempat, penggerak moral (*moral force*). Terkait dengan penelitian ini, keikutsertaan mahasiswa sebagai komunikator politik di Pilkada Sultra merupakan bagian dari penggerak moral. Artinya, mahasiswa diharapkan dapat menjaga stabilitas moral di lingkungan masyarakat terkait dengan implementasi Pilkada yang berintegritas. Selain itu, peran sebagai generasi penerus dimana mahasiswa telah melakukan praktik kepemimpinan terutama sebagai *opinion leader*.

Dalam konteks inilah, peran mahasiswa layak mendapatkan sorotan lebih. Berdasarkan hasil penelitian (Nazaruddin, 2024) ditemukan bahwa mahasiswa di Sultra turut aktif sebagai komunikator politik selama proses Pilkada berlangsung. Komunikator politik adalah mereka yang secara konsisten menyampaikan pesan politik kepada khalayak luas. Menurut Halloran, sosok ini memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik (Muslimin, 2020).

Nimmo mengklasifikasikan komunikator politik ke dalam tiga kategori, yakni politikus (*pols*), profesional (*pros*), dan aktivis (*activists*). Politikus merupakan mereka yang menyuarakan kepentingan politik sebagai bagian dari struktur partai atau kelompok tertentu. Profesional adalah jurnalis dan promotor yang berperan atas nama lembaga atau kandidat. Sementara aktivis adalah individu atau kelompok

masyarakat yang menyuarakan aspirasi secara independen. Mahasiswa sendiri kerap berada dalam posisi yang lentur dan dinamis, mereka bisa menjadi aktivis, sekaligus bertindak sebagai penyampai pesan kampanye atau bahkan membangun narasi politik mereka sendiri di ruang-ruang digital (Yusuf, 2022)

Tindakan yang dilakukan mahasiswa ini, dalam perspektif komunikasi politik dapat dikaitkan dengan strategi pemasaran politik, yakni rangkaian aktivitas yang dirancang secara terencana, strategis, dan taktis untuk menyebarkan pesan politik serta membentuk persepsi publik terhadap gagasan atau kandidat (Hurasan et al., 2022). Sejumlah penelitian sebelumnya sudah menggarisbawahi pentingnya komunikasi digital dalam membangun partisipasi politik generasi muda. Misalnya, studi oleh (Nurmi et al., 2024) menunjukkan komunikasi digital dapat meningkatkan partisipasi politik generasi milenial, khususnya dalam pemahaman dan tindakan di tengah derasnya informasi politik. Sementara itu, penelitian dari (Inggar Saputra & Firdaus, 2023) menyoroti peran mahasiswa sebagai pengawas partisipatif dalam Pemilu 2024 dan pentingnya pendidikan politik yang membekali dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dari berbagai studi tersebut, belum ada yang menggali peran mahasiswa sebagai komunikator politik aktif, bukan sekadar pemilih cerdas atau pengawas pasif. Selain itu, belum banyak yang menelaah bagaimana motivasi mereka terbentuk dalam memengaruhi opini sesama pemilih muda. Di sinilah letak celah (*gap*) dan keunikan (*novelty*) penelitian ini.

Dengan memanfaatkan pendekatan *Self-Determination Theory* (SDT) yang menekankan pentingnya motivasi internal seperti kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial, studi ini ingin memahami lebih dalam bagaimana mahasiswa di Sultra membentuk dan menjalankan perannya sebagai

komunikator politik dalam Pilkada 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberi perspektif baru tentang peran mahasiswa dalam demokrasi lokal, bukan sekadar objek sosialisasi, tetapi sebagai subjek aktif yang menyuarakan gagasan, membangun wacana, dan memengaruhi opini publik di era politik digital.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Komunikator Politik

Komunikasi politik pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki perhatian terhadap isu-isu publik. Namun, hanya sebagian kecil individu yang secara konsisten dan berkelanjutan menjalankan aktivitas tersebut sehingga mereka dikenal sebagai komunikator politik, yakni aktor yang berperan menyampaikan gagasan, informasi, serta pesan-pesan politik kepada masyarakat dan turut memengaruhi pembentukan opini publik. Menurut Leonard W. Doob yang dikutip oleh Dan Nimmo, komunikator politik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu politikus, profesional, dan aktivis. Politikus merupakan individu yang secara langsung terlibat dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan politik, sedangkan profesional merujuk pada pihak-pihak yang bekerja di bidang komunikasi atau informasi politik seperti jurnalis, konsultan politik, dan analis media. Sementara itu, aktivis adalah individu atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam advokasi isu sosial maupun politik tertentu. Ketiga jenis komunikator politik tersebut berasal dari latar belakang sosial dan profesi yang beragam, tetapi memiliki kesamaan peran sebagai penyampai, penafsir, sekaligus penggerak pesan politik dalam ruang publik sehingga berkontribusi terhadap dinamika komunikasi politik dalam masyarakat (Shahreza, 2017).

Komunikator menempati posisi strategis karena berperan dalam memilih, mengelola, serta menyampaikan informasi

yang berkembang di masyarakat. Kemampuan tersebut menjadikan komunikator memiliki pengaruh penting dalam pembentukan opini publik. Seorang komunikator politik tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga melakukan refleksi terhadap sikapnya kepada publik, termasuk bagaimana ia memandang audiens sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki martabat dan kepentingan. Kapasitas komunikator terbentuk dari pengalaman komunikasi, kemampuan intelektual, serta motivasi yang mendorongnya untuk terlibat dalam proses penyampaian pesan politik. Oleh karena itu, komunikasi politik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi, interpretasi, serta pembentukan makna politik di ruang public (Pureklolon, 2020).

2.2 Self Determination Theory (SDT)

Self-Determination Theory (SDT) merupakan satu diantara kerangka teori yang menjelaskan kepribadian dan motivasi manusia dengan menekankan hubungan antara individu dan lingkungan sosialnya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua bentuk utama motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik beserta berbagai variasinya. Kedua jenis motivasi tersebut memengaruhi cara individu merespons berbagai situasi dalam beragam konteks kehidupan, serta berkontribusi terhadap perkembangan sosial, kognitif, dan pembentukan kepribadian individu.

Terbentuknya motivasi yang bersifat mandiri menurut perspektif SDT, berkaitan dengan pemenuhan tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu *autonomy*, *competence*, dan *relatedness*. *Autonomy* merujuk pada kemampuan individu untuk menentukan pilihan dan tindakannya secara bebas, *competence* berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan suatu aktivitas secara efektif, sedangkan

relatedness menggambarkan kebutuhan individu untuk merasa terhubung dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya. Pemenuhan ketiga kebutuhan tersebut berperan penting dalam mendorong motivasi yang lebih otonom, meningkatkan kesejahteraan psikologis, serta mendukung pertumbuhan individu. Selain itu, teori ini juga menegaskan bahwa konteks sosial dan budaya memiliki pengaruh penting dalam mendukung atau menghambat pemenuhan kebutuhan psikologis tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada rasa kendali diri, kinerja, dan kesejahteraan individu (Legault, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam motivasi mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Halu Oleo yang didasarkan pada SDT. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman dan perspektif mahasiswa secara langsung dalam konteks yang alami dengan melihat pada tiga kebutuhan psikologis dasar mahasiswa, yaitu *autonomy*, *competence*, dan *relatedness*. Hal tersebut, sejalan dengan pandangan Lincoln dan Guba, pendekatan kualitatif membantu memahami realitas dari sudut pandang partisipan (Lincoln, 1985), sementara Moleong menekankan bahwa pendekatan ini bertujuan menggambarkan fenomena secara utuh dan bermakna (Moleong, 2007).

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Halu Oleo yang aktif sebagai komunikator politik. Informan dipilih secara *purposive* karena keterlibatannya yang relevan dengan fokus studi. Adapun, kriteria informan dalam penelitian ini, pertama berstatus sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP yang aktif di Universitas Halu Oleo pada Pilkada Serentak 2024. Kedua, ikut serta sebagai

komunikator pada Pilkada Serentak 2024, baik sebagai profesional, politikus dan aktivis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan format semi-terstruktur, memberikan ruang bagi narasumber untuk berbagi cerita dan refleksi secara terbuka. Analisis dilakukan mengikuti tahapan dari Miles dan Huberman (1994) yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilanjutkan dengan verifikasi (Miles, 1994). Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berangkat dari upaya untuk memahami mahasiswa dalam memaknai perannya sebagai komunikator politik dalam kontestasi Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. Dinamika politik lokal yang terus berkembang, menjadikan mahasiswa hadir tidak hanya sebagai pemilih atau pengamat, tetapi juga sebagai penyampai pesan, penggerak opini, bahkan sebagai juru bicara bagi calon pemimpin daerah. Sehingga, untuk melihat lebih dalam motivasi dibalik keterlibatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan SDT yang dikembangkan oleh Ryan & Deci (2017). Teori ini menjelaskan bahwa motivasi manusia akan berkembang secara optimal jika tiga kebutuhan psikologis dasarnya terpenuhi, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial (Legault, 2017). Ketika ketiganya berjalan selaras, seseorang cenderung terdorong untuk terlibat secara lebih tulus, konsisten, dan bermakna.

Selain itu, untuk memperkaya sudut pandang, penelitian ini juga mengacu pada teori komunikasi politik dari Dan Nimmo (1985) yang membagi komunikator politik ke dalam tiga kategori yakni komunikator profesional, aktivis, dan politikus.

Kerangka ini membantu menjelaskan tidak hanya bagaimana mahasiswa menyampaikan pesan politik, tetapi juga bagaimana mereka memposisikan diri dan menjalankan perannya di tengah kompleksitas medan politik yang nyata.

Pada penelitian ini, narasumber utama merepresentasikan peran yang beragam. Idhar Sugandi (informan 1) tampil sebagai komunikator profesional yang menjalankan fungsinya secara strategis dan berbasis kontrak. Yusdi Ananta (informan 2) hadir sebagai aktivis yang menjadikan komunikator politik sebagai bagian dari perjuangan sosial dan nilai. Sementara itu, Al Yandi Putra (informan 3) menunjukkan peran sebagai politikus muda yang aktif membentuk narasi politik dan menjalin kedekatan dengan konstituen. Ketiganya, menjadi potret bahwa mahasiswa bukan sekadar pelengkap dalam pesta demokrasi, melainkan aktor penting yang memainkan peran komunikatif secara sadar dan reflektif.

Dimensi Otonomi: Keterlibatan Mahasiswa sebagai Pilihan yang Otonom dan Sadar Nilai

Kebutuhan otonomi dalam SDT mendorong seseorang untuk bertindak secara sukarela sesuai nilai yang diyakini. Ketika mahasiswa merasa bahwa keterlibatan mereka sebagai komunikator politik adalah pilihan bebas yang bermakna, maka motivasi yang mereka miliki menjadi lebih kuat dan bertahan lama. Dalam penelitian ini, ketiga narasumber menyatakan bahwa keterlibatan mereka bukan sekadar keterpaksaan atau rutinitas, tetapi bentuk kontribusi aktif yang dipilih secara sadar. Mereka memiliki visi dan niat pribadi dalam aktivitas tersebut.

“Saya merasa terpenggil untuk ikut berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Saya ingin menggunakan kemampuan komunikasi saya untuk menyampaikan informasi yang

akurat dan relevan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang tepat,” ucap Yusdi Ananta, pada wawancara tanggal 2 April 2025.

“Saya bagian dari masyarakat Sultra dan saya merasa bisa berperan menjadikan daerah saya lebih baik dengan menjadi komunikator politik,” ungkap Idhar Sugandi, pada wawancara tanggal 29 Maret 2025.

“Saya memiliki keyakinan kuat tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik dan dampaknya terhadap masyarakat. Motivasi saya adalah untuk berkontribusi pada perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Al Yandi Putra, pada wawancara tanggal 5 April 2025.

Berdasarkan pada pernyataan di atas, menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa sebagai komunikator politik bukan dikarenakan tekanan dari eksternal. Melainkan, kesadaran yang selaras dengan nilai yang dianut. Kondisi ini sejalan dengan konsep otonom dari SDT bahwa ketika individu merasa bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan kehendak sendiri dan sesuai dengan identitas personalnya. Adapun, dalam kerangka teori Dan Nimmo (1985), hal ini mengindikasikan bahwa peran mereka dibentuk melalui kesadaran posisi. Idhar menempatkan dirinya sebagai penyedia jasa komunikasi dengan kesadaran profesional, Yusdi hadir sebagai aktivis yang membawa nilai sosial, dan Yandi menjalankan peran politikus yang merepresentasikan konstituen. Ketiganya menunjukkan bahwa otonomi bukan hanya tentang kebebasan bertindak, tetapi juga tentang makna dari tindakan itu sendiri.

Motivasi yang muncul bukan sekadar respons terhadap tuntutan lingkungan, tetapi telah mengalami proses internalisasi sehingga aktivitas komunikasi politik dipandang sebagai bagian dari kontribusi sosial yang bermakna. Kondisi tersebut senada dengan hasil kajian Azis et al. (2020), dimana keikutsertaan anak muda dalam proses elektoral didorong oleh rasa tanggung jawab sipil dan keyakinan akan nilai kontribusi diri mereka sebagai anak muda yang mencerminkan bentuk keterlibatan politik yang ditentukan diri sendiri. Hal ini terlihat dari keinginan informan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, mendukung pembangunan daerah, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga, peran mahasiswa sebagai komunikator politik tidak hanya mencerminkan fungsi komunikasi politik sebagaimana dijelaskan Dan Nimmo (1985), tetapi juga menunjukkan kebutuhan otonomi menjadi dasar dari munculnya motivasi yang bersifat lebih intrinsik dan berkelanjutan.

Dimensi Kompetensi: Konstruksi Kapabilitas Melalui Pengalaman Komunikasi Politik

Kompetensi dalam SDT berkaitan dengan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas secara efektif. Dalam praktik komunikasi politik, ini bisa terlihat dari cara mahasiswa menyampaikan pesan, merespons audiens, dan mengelola strategi komunikasi.

Para narasumber dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan yang mereka miliki diperoleh melalui proses belajar langsung di lapangan. Pengalaman dalam organisasi, forum diskusi, maupun praktik kampanye menjadi modal utama mereka dalam membentuk kepercayaan diri.

“Saya bisa menganalisis poin unik dari seseorang atau brand politik, dan dari sana saya bisa

mengambil keputusan untuk mengkomunikasikan seperti apa ke publik,” terang Idhar Sugandi, pada wawancara tanggal 29 Maret 2025.

“Saya menyampaikan pesan secara efektif lewat narasi yang disusun berdasarkan data, kemudian disesuaikan gaya komunikasinya untuk berbagai generasi,” ucap Yusdi Ananta, pada wawancara tanggal 2 April 2025.

“Melalui praktik kampanye dan diskusi politik, saya belajar bagaimana menyampaikan pesan secara efektif dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda,” jelas Al Yandi Putra, pada wawancara tanggal 5 April 2025.

Pernyataan para informan tersebut menunjukkan bahwa pengalamannya dalam organisasi, kampanye, dan diskusi politik telah membentuk keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menjalankan fungsi komunikasi politik. Adapun dalam perspektif *Self-Determination Theory*, kondisi ini mencerminkan terpenuhinya kebutuhan kompetensi, yaitu kebutuhan individu untuk merasa efektif dalam menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan (Ryan & Deci, 2017).

Kemampuan menganalisis kandidat politik, menyusun pesan berdasarkan data, serta menyesuaikan strategi komunikasi dengan karakteristik audiens menunjukkan bahwa para informan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga merasakan efektivitas diri dalam menjalankan perannya. Perasaan mampu tersebut menjadi sumber motivasi yang mendorong mereka untuk terus terlibat dalam aktivitas komunikasi politik. Partisipasi mahasiswa dalam Pilkada Serentak di Sultra yang didorong karena kompetensinya ini, sejalan dengan kajian Sobali Suswandy et al. (2025), Menurut Sobali Suswandy et al.

(2025) literasi politik yang rendah berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik, begitupun sebaliknya.

Kemudian, dilihat melalui perspektif Nimmo, kapabilitas ini menjadi penting karena komunikator politik tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membingkai wacana, mengatur persepsi publik, dan membangun pengaruh. Mahasiswa dalam hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memetakan isu, menyesuaikan strategi dengan audiens, serta mengevaluasi efektivitas komunikasi politik yang dilakukan.

Dimensi Keterhubungan Sosial: Relasi Dukungan Komunitas terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa

Keterhubungan sosial dalam SDT berperan penting untuk menciptakan rasa dimiliki dan dimaknai oleh lingkungan sosial. Ketika mahasiswa merasa menjadi bagian dari komunitas politik atau organisasi, mereka akan lebih termotivasi dan tahan terhadap tekanan eksternal. Pada penelitian ini, sebagian informan menyatakan keterlibatan mereka diperkuat oleh diskusi dengan teman, dukungan organisasi kampus, serta keterlibatan dalam forum publik. Namun, tidak semua merasakan keterhubungan yang kuat. Ada satu informan lebih memilih jalur profesional dan tidak terlalu terikat pada komunitas tertentu.

“Diskusi dengan teman-teman membuka wawasan saya terhadap berbagai perspektif politik, dan organisasi kampus mengasah keterampilan berbicara saya,” ucap Yusdi Ananta, pada wawancara tanggal 2 April 2025.

“Komunitas mahasiswa memberikan banyak kesempatan untuk debat, seminar, dan kampanye. Itu sangat memperkuat komitmen saya terhadap komunikasi politik,”

ujar Al Yandi Putra, pada wawancara tanggal 5 April 2025. “*Saya tidak merasa memiliki keterhubungan yang kuat dengan komunitas politik. Saya hanya murni jasa komunikator politik,*” ungkap Idhar Sugandi, pada wawancara tanggal 29 Maret 2025.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterhubungan sosial menjadi faktor yang memperkuat motivasi mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai komunikator politik. Diskusi dengan teman sebaya, keterlibatan dalam organisasi kampus, dan partisipasi dalam forum publik memberikan pengalaman sosial yang membuat mahasiswa merasa diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari komunitas yang memiliki tujuan bersama. Kondisi tersebut mencerminkan terpenuhinya kebutuhan *relatedness*, yaitu kebutuhan individu untuk membangun hubungan sosial yang bermakna dengan lingkungan sekitarnya dalam perspektif SDT (Ryan & Deci, 2017). Pemenuhan kebutuhan ini mendorong individu untuk mempertahankan keterlibatan dalam aktivitas yang dianggap penting karena memperoleh dukungan emosional maupun sosial dari kelompoknya.

Pada aspek *relatedness* ini, terdapat temuan menarik yakni terdapat informan yang tidak memperoleh penguatan motivasi melalui keterlibatan dalam komunitas mahasiswa dan forum politik. Informan tersebut menunjukkan pola yang berbeda melalui pernyataannya bahwa keputusan untuk menjadi komunikator politik merupakan pilihan pribadi yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, baik teman, keluarga, maupun komunitas kampus. Hal ini menunjukkan kuatnya kebutuhan otonomi karena keterlibatan politik didasarkan pada kesadaran dan pilihan diri sendiri.

Meskipun demikian, informan tersebut tetap mengakui adanya dukungan

dari orang-orang di sekitarnya meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan keterhubungan sosial tidak sepenuhnya tidak terpenuhi, melainkan hadir dalam bentuk dukungan sosial pasif yang memberikan penerimaan terhadap aktivitas yang dijalankannya. Rendahnya keterlibatan dalam organisasi mahasiswa maupun komunitas politik menyebabkan motivasi informan tersebut tidak bertumpu pada identitas kelompok, melainkan lebih didorong oleh kemampuan profesional yang dimilikinya sebagai komunikator politik.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan psikologis dalam SDT dapat terjadi melalui kombinasi yang berbeda pada setiap individu, di mana otonomi dan kompetensi dapat menjadi sumber motivasi yang lebih dominan dibandingkan keterhubungan sosial. Selain itu, berdasarkan sudut pandang Dan Nimmo (1985), perbedaan ini menjelaskan bahwa meskipun keterhubungan sosial bisa menjadi sumber kekuatan, tipe komunikator profesional juga memungkinkan bekerja secara independen. Berbeda dengan dua informan dari aktivis dan politikus yang membutuhkan komunitas sebagai basis ideologis.

Orientasi Motivasi Intrinsik: Peran Komunikator Politik sebagai Ruang Aktualisasi Diri Mahasiswa

Motivasi intrinsik muncul ketika aktivitas itu sendiri memberikan kesenangan dan makna bagi pelakunya. Dalam konteks ini, mahasiswa yang menjadi komunikator politik merasa bahwa aktivitas tersebut memberi ruang untuk mengekspresikan nilai, pemikiran, dan identitas diri mereka.

“*Saya cukup menikmati peran ini, terutama saat harus mengulik poin unik figur politik dan mengolahnya agar bisa dikomunikasikan ke publik,*” kata Idhar Sugandi, pada

wawancara tanggal 29 Maret 2025.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa informan memperoleh kepuasan dari proses kognitif dalam komunikasi politik. Kondisi ini mencerminkan terpenuhinya kebutuhan kompetensi dalam perspektif SDT, yaitu perasaan mampu dalam mengolah informasi dan menyampaikan pesan secara efektif.

“*Saya menikmati menyampaikan ide-ide politik yang bisa membentuk opini publik, dan itu memotivasi saya untuk terus terlibat,*” ucap Yusdi Ananta, pada wawancara tanggal 2 April 2025.

Kesenangan dalam membentuk opini publik menunjukkan adanya motivasi intrinsik yang didorong oleh kombinasi kompetensi dan *relatedness*. Hal tersebut dikarenakan informan tidak hanya menikmati proses komunikasi, tetapi juga dampak sosial dari pesan yang disampaikan.

“*Saya merasa puas ketika bisa menyampaikan isu-isu yang penting dan mendidik masyarakat soal kebijakan. Itu memberi saya arah dan makna,*” ungkap Al Yandi Putra, pada wawancara tanggal 5 April 2025.

Kemudian, rasa puas yang dirasakan informan ketika menyampaikan isu edukatif menunjukkan proses internalisasi nilai, di mana aktivitas komunikasi politik tidak lagi dipandang sebagai tugas eksternal, tetapi sebagai bagian dari identitas diri. Ini mencerminkan motivasi intrinsik yang kuat dalam SDT.

Adapun Dan Nimmo (1985) melihat bahwa peran komunikator politik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga eksistensial. Mahasiswa dalam hal ini tidak hanya menyuarakan kepentingan pihak lain, tetapi juga mengekspresikan kepribadian dan idealismenya. Maka, komunikasi

politik bukan sekadar kerja kampanye, tetapi perjalanan aktualisasi diri.

Motivasi Ekstrinsik sebagai Faktor Tambahan: Insentif dan Peluang dalam Partisipasi Politik Mahasiswa

Menurut Ryan & Deci (2017), motivasi ekstrinsik dalam SDT tidak dipahami sebagai kategori yang statis, melainkan berada dalam suatu proses internalisasi bertahap yang menunjukkan sejauh mana nilai eksternal telah diadopsi dan diintegrasikan ke dalam diri individu. Pada tingkat awal terdapat *introjected regulation*, yaitu kondisi ketika individu melakukan suatu tindakan bukan karena tekanan eksternal langsung, tetapi karena tekanan internal seperti rasa bersalah, takut gagal, atau dorongan untuk menjaga harga diri, sehingga perilaku masih bersifat terkontrol dan belum sepenuhnya selaras dengan nilai pribadi.

Tingkat berikutnya adalah *identified regulation*, yaitu ketika individu mulai mengakui dan menerima nilai penting dari suatu aktivitas, sehingga tindakan dilakukan karena kesadaran bahwa aktivitas tersebut bermanfaat dan relevan dengan tujuan pribadi, menjadikannya lebih otonom meskipun masih bersifat ekstrinsik. Pada tahap yang paling tinggi dalam motivasi ekstrinsik, yaitu *integrated regulation*, nilai dan tujuan eksternal telah sepenuhnya terinternalisasi dan menyatu dengan identitas diri individu. Sehingga perilaku yang dilakukan tidak hanya dianggap penting tetapi juga konsisten, meskipun tetap berorientasi pada hasil eksternal.

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, Meski motivasi intrinsik menjadi pendorong utama, dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi ekstrinsik juga hadir. Pada SDT, motivasi jenis ini dapat tetap mendukung apabila telah terinternalisasi dan selaras dengan nilai personal. Pada konteks mahasiswa sebagai komunikator politik, motivasi seperti bayaran, pengalaman kerja, atau jejaring

sosial menjadi pelengkap yang memperkuat keterlibatan.

“Insentif seperti beasiswa atau peluang karier memang jadi dorongan tambahan, tapi yang utama tetap kesadaran politik,” jelas Yusdi Ananta, pada wawancara tanggal 2 April 2025.

Insentif seperti beasiswa dan peluang karier tidak menjadi tujuan utama, tetapi berfungsi sebagai penguat identifikasi nilai. Hal ini menunjukkan bentuk *identified regulation*, dimana aktivitas komunikasi politik dipandang sebagai sesuatu yang bernilai bagi pengembangan diri dan kontribusi sosial.

“Insentif eksternal juga mempengaruhi keputusan saya, terutama karena mendukung pengembangan pribadi dan profesional saya,” kata Al Yandi Putra, pada wawancara tanggal 5 April 2025.

Pengaruh insentif eksternal yang mendukung pengembangan profesional menunjukkan adanya kombinasi *identified regulation* dan *introjected regulation*, di mana aktivitas dilakukan tidak hanya karena nilai personal tetapi juga karena orientasi pencapaian dan pengakuan sosial.

“Saya memposisikan diri sebagai profesional yang dibayar untuk mengkomunikasikan dalam waktu tertentu,” tegas Idhar Sugandi, pada wawancara tanggal 29 Maret 2025.

Posisi sebagai komunikator profesional yang dibayar menunjukkan bentuk *external regulation*, dimana keterlibatan dalam komunikasi politik masih dipengaruhi oleh imbalan eksternal dan kontrak kerja, meskipun tetap disertai kompetensi profesional yang tinggi.

Temuan menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa tidak bersifat dikotomis antara intrinsik dan ekstrinsik,

tetapi berada dalam spektrum internalisasi. Motivasi ekstrinsik dalam bentuk insentif dan peluang karier dapat menjadi bagian dari motivasi yang terinternalisasi ketika selaras dengan nilai personal dan identitas diri. Kemudian, melalui perspektif Nimmo, realitas ini menunjukkan bahwa komunikasi politik telah menjadi ruang baru yang terbuka dan profesional. Aktivistis mendapat pengakuan sosial, politikus memperluas pengaruh, dan profesional membangun portofolio karir. Perpaduan antara insentif dan nilai ini menciptakan bentuk partisipasi politik mahasiswa yang dinamis dan multidimensi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa mahasiswa tidak lagi berada di pinggir panggung demokrasi lokal. Mereka justru tampil sebagai aktor utama yang sadar akan kekuatan komunikasinya dalam Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Tenggara. Mahasiswa berperan sebagai penghubung antara gagasan politik dan masyarakat, menyuarakan informasi, membangun opini, dan menyampaikan aspirasi melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial hingga diskusi di kampus dan ruang publik lainnya.

Dengan menggunakan pendekatan SDT, terlihat bahwa partisipasi mereka bukan hasil dari tekanan luar atau kewajiban semata. Justru, keterlibatan ini lahir dari dorongan dalam diri karena mereka merasa memiliki kepedulian, kapasitas, dan berada dalam jejaring sosial yang mendukung. Ketika kebutuhan untuk merasa bebas, mampu, dan terhubung secara sosial terpenuhi, maka semangat untuk ikut terlibat tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Motivasi yang mereka miliki ini tidak semata-mata digerakkan oleh idealisme. Ada pula faktor-faktor realistik yang memperkuat keterlibatan mereka seperti peluang mengembangkan diri, memperluas jejaring, hingga pengalaman kerja yang relevan.

Sehingga dalam perspektif komunikasi politik Dan Nimmo (1985) mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini menampilkan tiga wajah peran komunikator politik yakni sebagai profesional yang mengandalkan keterampilan, sebagai aktivis yang digerakkan oleh nilai-nilai perjuangan, dan sebagai politikus muda yang ingin membangun kedekatan dengan masyarakat. Ketiganya menunjukkan bahwa komunikasi politik bukan hanya bisa dilakukan dari satu titik pandang, tetapi dari berbagai posisi yang sah dan bermakna.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi komunikator politik bagi mahasiswa bukan sekadar soal menyebarkan pesan kampanye. Namun juga sebagai ruang untuk mengekspresikan pemikiran, membentuk jati diri, dan ikut merumuskan arah masa depan daerah mereka. Temuan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa memiliki kapasitas, kesadaran, dan keberanian untuk menjadi penghubung antara wacana politik dan kesadaran publik dengan cara yang reflektif, bernilai, dan sangat relevan di tengah dunia digital yang makin terbuka dan dinamis.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar perguruan tinggi memperkuat ruang-ruang pendidikan politik yang kritis dan partisipatif bagi mahasiswa sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sebagai komunikator politik yang menyampaikan informasi, membangun diskursus publik, serta menyalurkan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik seperti diskusi publik, pelatihan literasi politik digital, dan forum dialog dengan pemangku kepentingan.

Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah diharapkan dapat

membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan mahasiswa sebagai bagian dari ekosistem komunikasi politik lokal guna memperkuat literasi politik masyarakat, menyebarkan informasi kepemiluan secara akurat, serta mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif, khususnya di kalangan pemilih muda.

Di sisi lain, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian yang lebih komprehensif mengenai peran mahasiswa sebagai komunikator politik dengan mempertimbangkan dimensi media digital, dinamika jejaring sosial, serta variasi konteks sosial budaya di berbagai daerah, sekaligus menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam agar pemahaman tentang motivasi, strategi komunikasi, dan dampaknya terhadap pembentukan opini publik serta partisipasi demokratis masyarakat dapat semakin mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, H. F. (2014, Oktober). Optimalisasi Peran Fungsi Mahasiswa sebagai *Agent of Change* dan *Social Control* dalam Permasalahan Ketahanan Pangan ASEAN 2015. *Prosiding Pertemuan Dan Presentasi Ilmiah Teknologi Akselerator Dan Aplikasinya*.
- Azis, H., Pawito, P., & Setyawan, A. (2020). Motif Penggunaan Media Informasi Politik oleh Anak Muda Tionghoa di Media Sosial. *ETTISAL : Journal of Communication*, 5(1). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3886>
- Dan Nimmo. (1985). *The Political Persuaders: The Techniques of Modern Election Campaigns*.
- Hurasan, R., Sidharta, V., Sophia, U., Ali Haji, R., & Maritim Raja Ali Haji, U. (2022). *GLOBAL KOMUNIKA Komunikasi Pemasaran Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Vol. 5).

- Indriyani, A. D. (2024, 8 Juli). Pilkada Sulawesi Tenggara 2024 dalam Angka, Jumlah Pemilih, TPS, Prediksi Calon di Pilgub Sultra. *Sultra.Tribunnews.Com*.
- Inggar Saputra, & Firdaus, F. (2023). Penguatan Nasionalisme Millennial Dalam Politik: Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), 129–136. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5582>
- Legault, L. (2017). *Self-Determination Theory*. In *Encyclopedia of Personality and Individual Differences* (pp. 1–9). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_1162-1
- Lincoln, Y. S. , dan E. G. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B. , dan A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muslimin, K. (2020). *Buku Ajar Komunikasi Politik* (S. Saidah, Ed.; Cetakan Ke 2). UNISNU Press.
- Nazaruddin. (2024). *Mahasiswa Sebagai Komunikator Politik Pada Pilkada Sultra 2024*. Universitas Halu Oleo.
- Nurmi, N., Dema, H., & Rahmat R, M. R. (2024). Komunikasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Millennial. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 699–712. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.235>
- Pureklolon, T. T. (2020). Komunikasi Politik: Kajian Subtansial dalam Pendekatan Politik. *Visi Komunikasi*, 19.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-Determination Theory* (K. W. Brown & J. D. Cresswell, Eds.). The Guilford Press.
- Shahreza, M. (2017). Komunikator Politik Berdasarkan Teori Generasi. *Journal of Communication (Nyimak)*, 1(1), 33–48.
- Sobali Suswandy, Muhammad Hendriyana, Rivaldi Saputra, Muhammad Abdul Fatah, Latif Latif, & Bagya Fajar Sidik. (2025). Keterlibatan Politik Generasi Muda Di Era Digital: Dinamika, Tantangan, Dan Peluang Dalam Pendekatan Kualitatif. *Educatus*, 3(2), 17–25. <https://doi.org/10.69914/educatus.v3i2.39>
- Yunus, S. R. (2024, 9 Desember). “Rekor” Partisipasi Pemilih di Sultra, dari Euforia hingga Dugaan Politik Uang. *Kompas.Id*.
- Yusuf, R. I. (2022). *Komunikasi Politik: Seni dan Teori*. Deepublish.